

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG MATI PAJAK DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Oleh**

**RIFQY WIRA TAMA**

Urusan pajak kendaraan bermotor berada di luar yurisdiksi Kepolisian dan Dinas Pendapatan Daerah. Jasa Raharja memegang mandat untuk mengawasi kompensasi untuk kecelakaan lalu lintas. Khususnya, Jasa Raharja akan terus memberikan perlindungan kepada para pengendara sepeda motor, meskipun mereka belum membayar pajak. Di Kabupaten Lampung Timur, peran Kepolisian dalam menegakkan tunggakan pajak kendaraan bermotor terbatas pada penerbitan stempel pengesahan tahunan, sebuah persyaratan yang harus diperbarui setiap tahun.

Penegakan sanksi atas tunggakan PKB berada di bawah kewenangan Dinas PAD, yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa denda, denda yang diperberat, dan biaya bunga. Di Kabupaten Lampung Timur, tantangan yang cukup besar dalam penegakan hukum atas tunggakan pajak ini adalah pemberian sanksi tilang kepada pemilik kendaraan yang tidak membayar PKB tahunan. Kurangnya penegakan hukuman ini tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku masyarakat atau inefisiensi penegakan hukum. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini, termasuk kendala hukum, tantangan penegakan hukum, dan dinamika masyarakat.

Saran dalam studi ini yakni dalam kepastian hukum disetiap kewenangan memiliki legalitas yang dapat berfungsi dengan tepat, dengan dasar penindakan kewenangan Kepolisian atas pelanggaran legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor. Agar aparat penegak hukum mempunyai kapasitas dan loyalitas yang profesional serta berintegritas dalam melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat pada kewajibannya dalam mengurus legitimasi dan ikut serta menjaga kenyamanan dalam berlalu lintas.

**Kata Kunci: Kewenangan, Kepolisian, Kendaraan Bermotor, Pajak.**

## **ABSTRACT**

### **POLICE AUTHORITY IN LAW ENFORCEMENT AGAINST DEAD MOTOR VEHICLES TAXES IN EAST LAMPUNG DISTRICT**

**By**

**RIFQY WIRA TAMA**

*Motor vehicle tax issues are not only the authority of the Police and Regional Revenue Service. Jasa Raharja has the authority to manage traffic accident compensation. Jasa Raharja firmly insists that it continues to provide guarantees for motorbike riders who do not pay tax. The authority of the Police in enforcing the law against tax-deducted motor vehicles in East Lampung Regency is in enforcing the law on motor vehicle tax arrears, the authority of the police is only limited to issuing endorsement stamps which must be replaced every year.*

*The enforcement of penalties for motor vehicle tax arrears falls under the purview of the Regional Revenue Office, which has the authority to impose sanctions such as fines, enhanced penalties, and interest charges. In East Lampung Regency, a significant challenge in enforcing these tax arrears is the issuance of ticketing penalties to vehicle owners who fail to pay their annual motor vehicle taxes. The lack of enforcement of these penalties is not solely due to community behavior or law enforcement inefficiency. Multiple factors contribute to this issue, including legal constraints, enforcement challenges, and community dynamics.*

*The suggestion in this research is that in legal certainty each authority has legality that can function properly, on the basis of taking action against the Police authority for violations of the legitimacy of motor vehicle operation. So that law enforcement officers have professional capacity and loyalty and integrity in carrying out their duties in serving the community in their obligations to maintain legitimacy and participate in maintaining comfort in traffic.*

**Keywords: Authority, Police, Motor Vehicles, Taxes.**